

Penanganan Korupsi Bansos Jalan Terus

SEMARANG- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng memastikan penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jateng 2010 dan 2011 tetap berjalan dan tak dihentikan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Jateng Masyhudi mengakui, sulit menangani perkara korupsi bansos. Sebab, jumlah saksi banyak dan tersebar ke berbagai daerah di Jateng. Karena itu, kejaksaan harus berhati-hati menangani perkara tersebut.

“Korupsi dana bansos berkesan agak lambat. Percaya, ini bukan apa-apa tetapi karena perkara ini sulit. Ada perkara masuk penyidikan belum lama, tetapi sudah rampung. Namun ada juga perkara yang penyidikannya lama, tetapi belum rampung,” kata Masyudi dalam siaran pers dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia di kantor Kejati Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Selasa (9/12).

Dalam kesempatan itu, turut hadir Kajati Jateng Hartadi dan Wakajati Ali Mukartono. Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Kejati Jateng sudah menetapkan tiga tersangka korupsi bansos.

Mereka adalah mantan Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah (Setda) Jateng Mohamad Yusuf, eks Kepala Biro Bina Sosial Joko Mardiyanto (kini staf ahli gubernur), dan mantan Ketua Tim Verifikasi Proposal, Joko Suyanto. Ketiga tersangka hingga kini belum ditahan dan masih leluasa beraktivitas.

Berdasar laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng tahun 2011, ter-

dapat indikasi penyimpangan dana bansos sebesar Rp 26,89 miliar. Dana itu disalurkan tanpa laporan pertanggungjawaban (LPj) memadai. Selain itu, alamat penerima dana bansos banyak yang fiktif.

Pencucian Uang

“Penanganan korupsi bansos ini bukan ada apa-apa, tapi kami memang harus hati-hati karena terkait saksi se-Jateng. Rumah saksi jauh-jauh, dari kabupaten/kota bahkan ada dugaan penyimpangan Rp 5 juta, Rp 7 juta, dan Rp 10 juta,” jelasnya.

Di sisi lain, Hartadi menegaskan kejaksaan telah berkomitmen untuk mengurangi tindak pidana korupsi. “Sepanjang tahun ini, Kejati telah melakukan penyidikan sebanyak 25 perkara korupsi dan satu kasus TPPU (tindak pidana pencucian uang). Di tingkat penuntutan, perkara yang ditangani Kejati sebanyak 148 perkara,” jelasnya. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Jateng, terdapat 103 perkara masuk penyidikan dan satu TPPU.

Terdapat beberapa eks kepala daerah tersangkut korupsi, yakni mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih, mantan Bupati Kendal Siti Numarkesi, mantan Bupati Kudus HM Tamzil, mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo, mantan Bupati Demak Endan Setyaningdyah, serta mantan Bupati Semarang Bambang Guritno.

Selain itu ada kepala daerah yang masih aktif menjabat, yakni Bupati Rembang M Salim. Istri Wali Kota Salatiga Yuliyanto, yakni Titik Kimaningsih juga terjerat kasus korupsi. (J17,J14 - 61)